

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara-negara sedang berkembang di dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada permasalahan yaitu pembangunan ekonomi dan kemiskinan. Tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata. Pemerataan pembangunan adalah pemerataan pembangunan pusat dan daerah seperti yang diharapkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah. Maka, pemerintah pusat memberikan otonomi pemerintah daerah yang didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Untuk keperluan tersebut diperlukan perencanaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat pendidikan dan teknologi yang digunakan, meskipun pertumbuhan ekonomi dapat bergantung kepada banyak faktor. Sedangkan

kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (Word Bank, 2004). Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Menurut Ravallion (2001) (dalam Arsyad, 2010) kemiskinan adalah “kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat”. Jadi kemiskinan dapat diartikan dimana kondisi suatu individu atau kelompok yang dihadapi pada sebuah kondisi dimana ketidakmampuannya individu atau kelompok tersebut untuk memenuhi kebutuhan akan kepentingan pribadinya seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan yang dipengaruhi karena pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup. Dan kemiskinan juga mempengaruhi perkembangan dari prekonomian daerah itu sendiri dimana terhambatnya proses pembangunan daerah itu sendiri, dan juga menghambat arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu danberkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003).

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadikesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Jumlah penduduk miskin antar provinsi di Indonesia berbeda, akan tetapi yang menjadi sorotan adalah Jumlah penduduk miskin provinsi di Pulau Jawa yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di luar Pulau Jawa. Padahal setiap provinsi memiliki akses dan fasilitas untuk pemenuhan Kebutuhan hidup. Terutama provinsi-provinsi yang ada di pulau jawa dimana akses untuk kepusat pemerintahan lebih mudah begitu juga sebaliknya dari pusat ke daerah yang ada di pulau jawa dibandingkan dari daerah yang berada diluar pulau jawa. Kemiskinan di Pulau Jawa antar provinsi Juga berbeda, berikut data yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa.

**Tabel 1.1**

**Persentase Kemiskinan Enam Provinsi di Pulau Jawa**

**Tahun 2005-2011**

<b>Provinsi</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Banten	8.86	10.67	9.07	8.15	7.64	7.16	6.32
DKI Jakarta	3.61	4.52	4.61	4.29	3.62	3.48	3.75
DI .Yogyakarta	18.95	20.32	18.99	18.32	17.23	16.83	16.08
Jawa Barat	13.06	12.05	13.55	13.01	11.96	11.27	10.65
Jawa Timur	19.95	20.23	19.98	18.51	16.68	15.26	14.23
Jawa Tengah	20.49	20.17	20.43	19.23	17.72	16.56	15.76

*Sumber : Badan Pusat Sratistik Indonesia*

Dari data diatas menunjukkan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa seperti

Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI.Yogyakarta menempati urutan tertinggi. Terutama yang menjadi sorotan adalah Provinsi Jawa Timur padahal Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional secara signifikan, terhadap total perekonomian Indonesia. Jawa Timur merupakan pusat perekonomian bagi wilayah timur Indonesia. Jawa Timur juga memiliki industri besar baik berskala nasional maupun Asia Tenggara (DEPKEU). Pemerintah sudah menetapkan berbagai kebijakan melalui berbagai program untuk menekan tingkat kemiskinan. Ada dua cara yang dilakukan untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, yaitu mengurangi beban biaya bagi rumah tangga sangat miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2006). Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut .

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang

dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro 2000).

Pada awal tahun 1970, para ahli ekonomi mulai meragukan manfaat pertumbuhan pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi sebab di banyak negara yang sedang berkembang terdapat gejala adanya kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan pengangguran yang cenderung meningkat walaupun pendapatan nasional mengalami peningkatan secara stabil. Oleh sebab itu, mulai awal tahun 1970 muncul pendapat bahwa apabila pembangunan tidak disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin, maka mustahil akan memberikan hasil yang optimal. Dalam periode tersebut munculah teori-teori baru seperti Teori Pertumbuhan dan Distribusi New-Keynesian oleh Kaldor (1955) dan Passinetti (1962). Secara umum, teori-teori ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi akan mencapai hasil yang optimal jika peningkatan pendapatan nasional disertai dengan pemerataan pendapatan bagi seluruh kelompok masyarakat (Tambunan dalam Dian Octaviani, 2001). Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang sangat besar akan berpengaruh terhadap kondisi sosial manusia di Jawa Tengah. Permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun ke depan masih diprioritaskan pada masalah-masalah sosial yang mendasar, antara lain besarnya angka kemiskinan dan pengangguran.

**Tabel 1.2**

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga  
Konstan 2000 Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2005 - 2011 (Persen)**

Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DKI Jakarta	6.01	5.95	6.44	6.23	5.02	6.50	6.73
Jawa Barat	5.60	6.02	6.48	6.21	4.19	6.20	6.48
Jawa Tengah	5.35	5.33	5.59	5.61	5.14	5.84	6.03
DI.Yogyakarta	4.73	3.70	4.31	5.03	4.43	4.88	5.17
Jawa Timur	5.84	5.80	6.11	5.94	5.01	6.68	7.22
Banten	5.88	5.57	6.04	5.77	4.71	6.11	6.39

*Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya,

sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan perkapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

**Tabel 1.3**

**Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi  
Di Pulau Jawa (persen), 2005-2011**

<b>Provinsi</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Banten	95.60	95.60	95.60	95.60	95.95	96.20	96.25
DKI Jakarta	98.3	98.4	98.76	98.76	98.94	99.13	99.15
DI .Yogyakarta	86.69	86.69	87.78	89.46	90.18	90.84	91.49
Jawa Barat	94.61	94.91	95.32	95.53	95.98	96.18	96.29
Jawa Timur	85.80	87.10	87.42	87.43	87.80	88.34	88.52
Jawa Tengah	87.35	88.24	88.62	89.24	89.46	89.95	90.34

*Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia*

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika dunia pendidikan suatu bangsa sudah jeblok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan tau mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan



kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. Tingkat pendidikan dapat diukur salah satunya dengan besarnya angka melek huruf. Dan berdasarkan tabel 1.3 tingkat melek huruf Menurut Provinsi Di Pulau Jawa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 cenderung meningkat.

**Tabel 1.4**

**Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Di Pulau Jawa (persen), 2005-2011**

<b>Provinsi</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Banten	14.23	16.34	15.75	15.18	14.97	13.68	13.06
DKI Jakarta	14.73	14.31	12.57	12.16	12.15	11.05	10.80
DI .Yogyakarta	5.05	6.25	6.10	5.38	6.00	5.69	3.97
Jawa Barat	14.73	14.50	13.08	12.08	10.96	10.33	9.83
Jawa Timur	8.45	7.72	6.79	6.42	5.08	4.25	4.16
Jawa Tengah	8.51	8.20	7.70	7.35	7.33	6.21	5.93

*Sumber : Badan Pusat Sratistik Indonesia*

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Menurut Provinsi Di Pulau Jawa besarnya tingkat pengangguran bergerak secara turun. Dan di

tahun 2006 dan tahun 2009 di Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 6.25 persen dari 5.05 pada 2005 dan 6.00 persen pada 2009 dari 5.38 persen pada 2008.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, melihat Provinsi di Jawa dalam periode 2005-2011 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan. dibanding dengan provinsi-provinsi lain, provinsi di pulau Jawa adalah yang paling tinggi tingkat kemiskinannya. Oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan Provinsi di pulau Jawa. Dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana **pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB, Pendidikan, Pengangguran, dan Angka Harapan Hidup Terhadap Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2005-2011**. Penelitian ini akan menggunakan metode data panel, yaitu penggabungan antara data time series dan data cross section. Untuk mengolah data panel akan digunakan metode regresi panel data.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa .
2. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa.
3. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa.
4. Bagaimna pengaruh Angka Harapa Hidup terhadap kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa.
4. Mengetahi bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis, sebagai sarat memperoleh gelar S1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bagi PEMDA setempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan perencanaan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan pada periode selanjutnya

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### **1. Bab I Pendahuluan**

Isi dari Pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **2. Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori.**

Kajian pustaka merupakan pengkajian dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Sedangkan landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

### **3. Bab III Metode Penelitian.**

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan cara mengumpulkan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

### **4. Bab IV Hasil dan Analisis.**

Dalam bab ini terdapat dua subbab yaitu diskripsi data penelitian yang berupa pemaparan data yang digunakan dalam penelitian dan hasil serta analisis yang merupakan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisisnya.

### **5. Bab V Simpulan dan Implikasi.**

Simpulan merupakan simpulan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Implikasi merupakan hasil dari simpulan dan digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah.